

PROBLEM ANALYSIS

Dalam menentukan arah kebijakan, Pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan data kependudukan yang nantinya akan berperan dalam memetakan keadaan penduduk, mulai dari usia, taraf hidup, hingga kondisi penduduk di suatu wilayah.

Untuk itu, Pemerintah telah memanfaatkan perekaman data penduduk, yang salah satunya juga berfungsi untuk memudahkan penduduk dalam mengakses layanan publik. Selain itu pula, layanan publik saat ini juga hampir selalu mewajibkan penduduk melampirkan tanda bukti kependudukan yang mencakup nomor kependudukan, identitas, serta informasi pribadi lainnya.

Adapun beberapa pelayanan publik yang mewajibkan data pribadi antara lain: pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, perbankan, hingga pendaftaran/ registrasi akun dalam layanan belanja *online* pada perusahaan swasta.

Dengan maraknya persyaratan yang mewajibkan penduduk untuk membagi data pribadinya dalam mengakses layanan publik, tak ayal terkadang ditemukan data pribadi yang tersebar di internet. Berdasar isu yang beredar, data tersebut diselewengkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk keuntungan pribadinya, selain itu pula karena masih lemahnya sistem keamanan digital sehingga memungkinkan pencurian data oleh pihak-pihak yang tidak berwenang.

Hingga saat ini, telah terjadi beberapa kebocoran data dari berbagai layanan publik. Di antaranya yaitu bocornya data sejumlah 1.3 juta pengguna eHAC yang dapat diakses bebas oleh publik, penjualan data pribadi pengguna layanan BPJS dalam mata uang kripto, kebocoran data dari perusahaan penyedia jual beli online, hingga kebocoran data pada Komisi Pemilihan Umum. Contohnya adalah kasus yang menimpa Presiden Bapak Joko Widodo pada saat sertifikat vaksinnya diduga bocor dan beredar di media sosial. Sertifikat vaksin Presiden yang diduga bocor itu bukan karena aplikasi PeduliLindungi dibobol, melainkan karena ada ada oknum yang memiliki data NIK Presiden Joko Widodo yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sementara itu masyarakat juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi masing-masing. Contohnya, akhir-akhir ini ada seorang pemuda yang berhasil menghasilkan uang dari menjual foto-fotonya di internet. Hal ini tentu memicu beberapa masyarakat awam untuk dapat menghasilkan uang melalui cara yang sama, tanpa menyadari bahaya yang ditimbulkan akibat membagikan data pribadinya di internet. Padahal dalam 5 tahun terakhir, polisi siber mencatat laporan pencurian data mengalami peningkatan sebanyak 810%.

Pemerintah telah berupaya untuk melindungi data pribadi masyarakat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008. Akan tetapi tentu saja peran Pemerintah melalui instansi perangkat daerah dalam mengedukasi masyarakat untuk lebih bijak dalam menyikapi pengamanan data pribadi juga sangat diperlukan.

Tugas Anda

Dalam simulasi ini Anda merupakan salah satu pegawai pada perangkat daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang kependudukan, saat ini Bidang Anda sedang menerima aduan tentang bocornya data pribadi penduduk yang tersebar di internet.

Melihat posisi & peran Anda sebagai pegawai pemerintah, bagaimana Anda menanggapi permasalahan di atas? Berikan Inovasi yang dapat diterapkan di dinas Anda untuk mengatasi permasalahan tersebut! Tuangkan pemikiran Anda dalam bentuk tulisan formal.

Anda mempunyai waktu 45 menit untuk menyelesaikan tugas ini.